PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MENGURUS IDENTITAS KEPENDUDUKAN SECARA LANGSUNG (GEMILANG) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

Kintan Tri Mauludiah[1], Bambang Kusbandrijo[2], Dida Rahmadanik[3]

kintansrechyvin@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

In the revolutionary era, public service is a primary service in administering the government. The Department of Population and Civil Registration of Lamongan Regency is one of the government agencies which carry out public services related to Population Identity. Population identity is very important as the accurate population data to support development programs. Currently, Department of Population and Civil Registration of Lamongan Regency is creating a new program "pick up ball service" as the Direct Population Identity Management Movement program. The program is known as GEMILANG. This program was chosen because the level of management in completing the population identity of the Lamongan societies was still low, especially for electronic KTP (el-KTP). At 2019 there were still 12,511 Lamongan residents who had not recorded KTP-el. Moreover, 33,019 residents of Lamongan Regency had not printed KTP -el. To solve the problem, The Department of Population and Civil Registration of Lamongan Regency improves some services, namely picking up the ball. The program was intended to increase the enthusiasm of Lamongan societies to complete the management of population identity.

Based on the issue, the researcher conducted observations about the implementation of the GEMILANG program by the Department of Population and Civil Registration of Lamongan Regency. The type of research is descriptive qualitative. Researchers used data collection. To collect the data, the researcher carried out two techniques, namely interviews and documentation. Data analysis techniques are performed by data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that

the GEMILANG program conducted by The Department of Population and Civil Registration of Lamongan Regency had been successful to increase the management of population identity of Lamongan society. Supporting factors in the GEMILANG program according to the theory put forward by George C. Edwards III in (Nugroho R., 2009), include communication, resources, disposition and organizational structure including: the ability of the employees in delivering information and the consistency of information to the applicant; the ability of the employees to deliver the program; adequate staff and facilities provided; the level of commitment and honesty of the employees as well as democratic level in implementing the program; and adequate program with the SOP. The problem faced by some societies is about the low internet connection in some rural areas. Therefore, the researcher suggests to the officer to rearrange the infrastructure items to success the implementation of GEMILANG program in the Department of Population and Civil Registration in Lamongan Regency.
Keywords: *policy implementation, GEMILANG program, Dispendukcapil.*

ABSTRAK

Di era revolusi, pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik berupa jasa yaitu berkaitan dengan Identitas Kependudukan. Identitas Kependudukan sangat penting sebagai sumber keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan melakukan suatu terobosan baru atau dengan menerapkan jemput bola yaitu program Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Secara Langsung atau disingkat dengan GEMILANG. Hal itu dilakukan karena tingkat kepengurusan kelengkapan identitas kependudukan masyarakat Lamongan masih rendah, terutama untuk KTP elektronik (KTP-*el*), sampai tahun 2019 masih tercatat sebanyak 12.511 warga Kabupaten Lamongan yang belum melakukan perekaman KTP-*el* dan sebanyak 33.019 warga Kabupaten Lamongan belum mencetak KTP-*el.* Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meningkatkan pelayanan salah satunya dengan melakukan jemput bola. Melalui program tersebut, Dinas Kependudukan berharap masyarakat lebih semangat dalam rangka melengkapi pengurusan identitas kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan pengamatan tentang pelaksanaan program GEMILANG oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lamongan. Adapun jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program GEMILANG yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan adanya peningkatan kepengurusan identitas kependudukan oleh masyarakat Lamongan. Faktor pendukung pada program gemilang sesuai teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi diantaranya: kemampuan implementor dalam penyampaian informasi dan konsistensi informasi kepada pemohon; kemampuan implementor dalam menyampaikan program; jumlah staf yang memadai serta fasilitas tempat yang diberikan; tingkat komitmen dan kejujuran para implementor serta tingkat demokratis para implementor dalam pelaksanaan program; dan kesesuaian program dengan SOP yang telah disosialisasikan. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan jemput bola diantaranya jaringan koneksi internet yang kurang memadai pada daerah pelosok. Adapun saran peneliti dalam pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam hal sarana prasarana harus lebih ditingkatkan lagi untuk menyukseskan keberhasilan program tersebut.
Keywords : *implementasi kebijakan, program gemilang, Dispendukcapil*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan yang sering dijumpai oleh masyarakat yaitu permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara publik berupa jasa kepada masyarakat untuk kepentingan umum. Penyelenggara publik tersebut yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik berupa jasa yaitu berkaitan dengan Identitas Kependudukan. Identitas

Kependudukan merupakan hal yang penting karena dapat membantu terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan Dalam melaksanakan kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik tentunya memiliki rencana kinerja tahunan dimana untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan Pemendagri nomor 18 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi dan untuk memenuhi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Secara geografis, kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,8 km^2 atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Tidak semua wilayah desa/dusun memiliki jarak yang dekat dengan lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah desa Kedungkumpul kecamatan Sukorame yang merupakan wilayah paling selatan di kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung dengan kabupaten jombang dan kabupaten Bojonegoro, yang memiliki jarak kurang lebih 65 km dari pusat Kota Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Lamongan hingga akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 12.511 warga Kabupaten Lamongan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-*el*) dan sebanyak 33.019 warga Kabupaten Lamongan belum mencetak KTP Elektronik (KTP-*el)*. Sedangkan setiap hari terjadi penambahan penduduk yang wajib KTP. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meningkatkan pelayanan salah satunya dengan melakukan jemput bola.

Program pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Lamongan yaitu program Gerakan Mengurus Identitas Kependudukan Secara Langsung atau disingkat dengan GEMILANG. Program ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kepengurusan identitas kependudukan untuk memenuhi kepuasan

masyarakat. Program tersebut diciptakan karena mengharapkan penduduk lebih semangat dalam rangka melengkapi pengurusan identitas kependudukan. Melihat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan melalui program GEMILANG, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan program GEMILANG dan faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan PencatataniSipil Kabupaten Lamongan.

Kajian Teori

Menurut (Suharno, 2008), Implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan publik (public servises) kepada masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008), mengemukakan pengertian implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Suatu tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Teori George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapate empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi yang berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang lebih tepat. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Hal ini menyangkut kepada proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Selain itu intensitas komunikasi dalam melakukan sosialisasi program/kebijakan efektif yang dijalankan juga memengaruhi keberhasilan komunikasi.

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya staff dengan kemampuan yang layak untuk mengemban tugasnya dan juga informasi, kewenangan, dan fasilitas dibutuhkan untuk melaksanakan naskah kebijakan menjadi fungsi pelayanan publik yang sesungguhnya dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan efektif.

3. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi

yang baik, maka implementor tersebut akan menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

   Adalah Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang terpenting dari struktur organisasi adalah adanya Standard Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Veteran No.51, Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan instansi yang berperan penting dalam kepengurusan identitas kependudukan. Selain itu, dari masyarakat kabupaten lamongan dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan masih sangat kurang sehingga peneliti tertarik memilih kasus ini dengan pelaksanaan program GEMILANG yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Selain itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor pendukung serta faktor yang jadi penghambat program GEMILANG yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Adapun yang menjadi focus utama dalam Pelaksanaan program GEMILANG di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan dilihat dari Teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Dalam penelitian ini, sumber data dalam penggalian data yang dikumpulkan dari penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui observasi maupun wawancara dengan pihak informan (sumber pertama). Adapun metode pengambilan sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pegawai bagian pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan bagian pendaftaran program GEMILANG.
2. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung sebagai penunjang dari sumber data informan. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau literature-literatur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data mengenai pelaksanaan program GEMILANG berupa gambaran umum mengenai program GEMILANG, hasil pelaksanaan program GEMILANG, dan Standart Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan program GEMILANG.

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara (*interviews*), Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Pada penelitian

inipeneliti menggunakan kategori wawancara struktur. Dalam hal ini, peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Pada penelitian ini, narasumber yang akan di wawancarai yaitu pegawai bagian pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan masyarakat yang mengikuti pelaksanaan program GEMILANG.

2. Dokumentasi (*Documentation)*. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2013), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumentasi yang didapatkan dapat berupa catatan-catatan, foto-foto dokumentasi dan foto yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Semua dokumentasi ini akan dikumpulkan demi kelengkapan data penelitian.

Adapun peneliti dalam proses analisis data dalam penelitian pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan menggunakan langkah seperti yang dikemukakan oleh (Bungin, 2003), yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection);* Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*)

Hasil Penelitian

Program GEMILANG merupakan singkatan dari sebuah program gerakan mengurus dentitas secara langsung yang dilakukan para implementor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Dalam mewujudkan stelsel aktif pemerintah, para implementor melakukan jemput bola dokumen kependudukan di 27 kecamatan, dimana pada kegiatan tersebut melayani perekaman KTP-*el*, Cetak KTP-*el*, Cetak KK, dan Cetak KIA. Dalam pelaksanaan program ini juga diharapkan masyarakat sadar administrasi kependudukan.

Hasil kepengurusan pada pelaksanaan program gemilang di tahun 2017 sampai 2019 dapat dibentuk sebuah grafik seperti berikut:

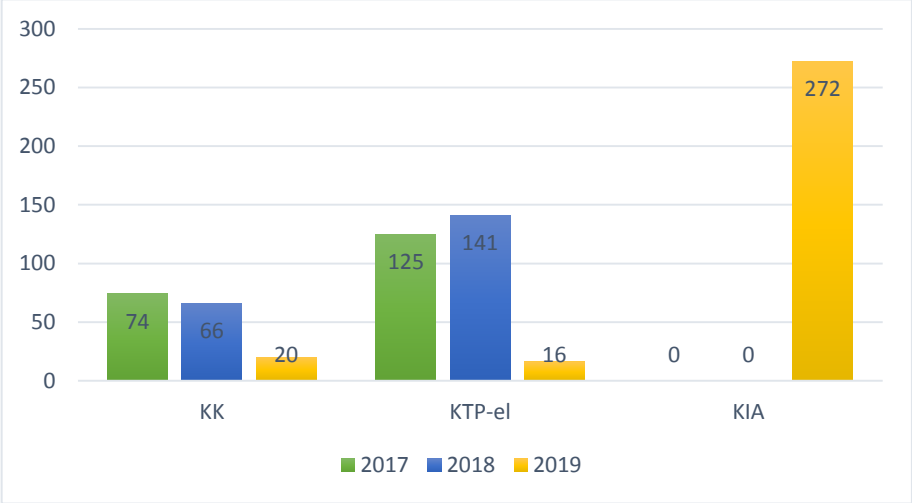

Gambar 1. Perkembangan Hasil Kepengurusan Identitas Kependudukan pada Progran Gemilang tahun 2017-2019 per-Kecamatan (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020)

Berdasarkan data di atas, kepengurusan identitas kependudukan pada program GEMILANG pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan pada kepengurusan KK dari 74 menjadi 66 dan pada tahun 2019 menjadi 20. Hal ini menunjukkan tingkat kepengurusan KK semakin berkurang, karena masyarakat telah menggunakan kesempatan pelaksanaan program gemilang pada tahun-tahun awal diadakannya program GEMILANG. Sedangkan kepengurusan KTP-*el,* mengalami peningkatan dari tahun 2017 menuju tahun 2018 yaitu dari 125 menjadi 141. Hal ini menunjukkan motivasi masyarakat dalam sadar kepengurusan identitas diri semakin kuat. Namun, pada tahun

2019 kepengurusan KTP-*el* mengalami penurunan menjadi 16 pemohon rata-rata per-kecamatan. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang sudah memiliki KTP-*el* pada tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 KTP-*el* telah berlaku seumur hidup.

Selanjutnya pada kepengurusan KIA, pada tahun 2017 dan 2018 masih belum ada karena belum berlakunya KIA di kabupaten Lamongan. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat rata-rata kepengurusan KIA sebesar 272 pemohon per-kecamatan karena pada awal tahun 2019 telah disosialisasikan tentang adanya kepengurusan KIA. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat dalam melengkapi identitas kependudukan KIA dengan menggunakan kesempatan pada pelaksanaan program GEMILANG oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk persentase kenaikan kepengurusan identitas kependudukan pada program GEMILANG dapat digambarkan pada grafik berikut:

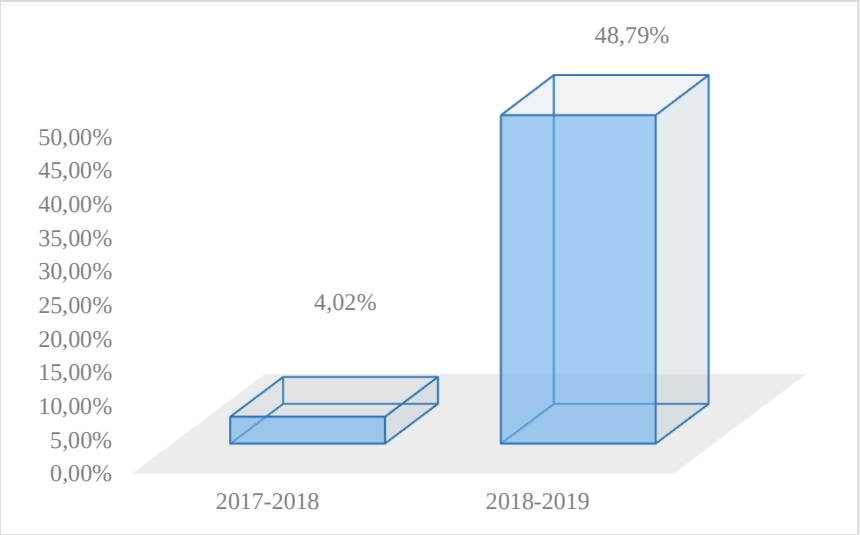

Gambar 2. Persentase kenaikan kepengurusan identitas kependudukan pada Progran Gemilang tahun 2017-2019 per-Kecamatan (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2020)

Peningkatan kepengurusan identitas kependudukan pada program GEMILANG pada tahun 2017-2018 sebesar 4,02% dan pada tahun 2018-2019

sebesar 48,79%. Peningkatan kepengurusan ini tentu ada banyak faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhinya. Masyarakat mengaku bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya program gemilang. Proses pengurusan lebih hemat, mudah, dan efektif karena pada pelaksanaan program gemilang ini sama sekali tidak dipungut biaya untuk proses administrasi kependudukan. Selain itu masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan untuk melakukan kepengurusan, tapi cukup mendatangi kantor kecamatan yang letaknya cukup dekat. Apalagi terdapat kemajuan lagi untuk tahun 2020, masyarakat cukup datang ke kantor kelurahan atau kantor desa untuk melengkapi identitas kependudukan karena program GEMILANG dilaksanakan pada desa ke desa di seluruh wilayah kabupaten Lamongan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamongan telah melaksanakan program GEMILANG dengan pemerintahan yang terbuka atau disebut Open Government. Menurut (Project, 2015), mendefinisikan Open Government atau Pemerintahan terbuka sebagai pemerintahan yang menyebarkan informasi, memberdayakan masyarakat dengan alat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan mendorong partisipasi warga dalam kebijakan publik. Informasi pelaksanaan program GEMILANG tersosialisasi dengan baik kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengetahui dengan jelas usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Lamongan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik dengan cara jemput bola sehingga menarik motivasi masyarakat dalam melengkapi identitas kependudukan.

Peningkatan kepengurusan ini dipengaruhi banyak faktor pendukung maupun penghambat. Masyarakat mengaku bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya program gemilang. Proses pengurusan lebih hemat, mudah, dan efektif karena pada pelaksanaan program gemilang ini sama sekali tidak dipungut biaya untuk proses administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan pelayanannya, para implementor harus mengetahui variabel-

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan Teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yaitu :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan program GEMILANG dalam hal komunikasi menjadi salahsatu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan.Komunikasi tersebut meliputi transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan implementor kepada pemohon dapat diterima dengan baik oleh pemohon. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada karena sebelum implementor terjun dalam pelaksanaan program gemilang telah dilakukan *breafing* agar para implementor lebih memahami bagaimana prosedur pelaksanaan program gemilang.
2. Sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan program GEMILANG dalam hal sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Keberhasilan sumber daya ini dapat dilihat dari jumlah staf yang sudah mencukupi dan informasi yang diberikan implementor kepada pemohon sudah jelas. Selain itu dari segi fasilitas juga memengaruhi keberhasilan sumber daya, dalam pelaksanaan program gemilang ini fasilitas tempat sudah memadai, namun untuk koneksi jaringan di daerah yang tingkat koneksi rendah masih membutuhkan perhatian khusus untuk ditingkatkan lagi agar tidak menjadi penghambat dalam kesuksesan pelaksanaan program gemilang.

3. Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan program GEMILANG dalam hal disposisi telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Keberhasilan disposisi ini dapat dilihat dari tingkat komitmen dan kejujuran para implementor dalam pelaksanaan program gemilang, yang di buktikan dengan tidak pernah terjadi pungli dan gratifikasi yang dilakukan oleh implementor. Selain itu, dari tingkat demokratis para implementor dalam pelaksanaan program gemilang ini sudah baik dibuktikan dengan tidak pernah terjadi ketidak-adilan dalam pelaksanaan program tersebut.
4. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah mensosialisasikan SOP sebelumnya. Sehingga, seluruh dari informan menyatakan bahwa pelaksanaan program GEMILANG sudah efektif. Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada pelaksanaan program GEMILANG dalam hal struktur birokrasi telah dilakukan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pada program GEMILANG yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terealisasi sesuai tujuan, hal ini dilihat dari kepengurusan identitas kependudukan pada program GEMILANG mengalami peningkatan dengan persentase rata-rata jumlah keseluruhan kepengurusan identitas kependudukan per-kecamatan meningkat dari 4,02 % menjadi 48,79 %.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sesuai teori yang di kemukakan oleh George C. Edwards III dalam (Nugroho R. , 2009), meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi diantaranya :

a. Faktor pendukung pada pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meliputi
   1) Kemampuan implementor dalam penyampaian informasi dan konsistensi informasi kepada pemohon
   2) Kemampuan implementor dalam menyampaikan program
   3) Jumlah staf yang memadai serta fasilitas tempat yang diberikan
   4) Tingkat komitmen dan kejujuran para implementor
   5) Tingkat demokratis para implementor dalam pelaksanaan program
   6) Kesesuaian program dengan SOP yang telah disosialisasikan.
b. Faktor penghambat pada pelaksanaan program GEMILANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan meliputi jaringan koneksi internet yang kurang memadai pada daerah yang koneksi internetnya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Afabeta.

Suharno. (2008). *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta: UNY Press.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. . (1975). *The Policy Implementation Process : "A Conceptual framework".* Administrati.